



PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Eny Latifah*¹, Rudi Abdullah²

¹Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: eni.lathifah@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 10 Maret 2023</p> <p>Revised : 02 April 2023</p> <p>Accepted : 03 Mei 2023</p> <p>Publication : 30 Mei 2023</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Green Economy, Blue Economy, Sustainable Development Goals, Maqashid Al-shariah</i></p> <p>Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Sustainable Development Goals, Maqashid Syariah.</p> <hr/> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>Economic governance manages by maintaining and maintaining the use of the environment in a green economy and blue economy which will encourage the government to realize the sustainable development of a country. Research using a descriptive method of this type of literature has the aim of knowing the role of the green and blue economy in realizing sustainable development. The results of the study show that the role of the green and blue economy in realizing sustainable development is (1) realizing community welfare through the approach of partnership, institutional, fisheries and tourism, and entrepreneurship aspects; (2) reducing poverty, carbon dioxide emissions, and ecosystem degradation; (3) increasing human well-being and reducing inequality through activities that do not expose future generations to significant environmental risks and ecological scarcity; (4) "conservation" and "restoration" efforts to preserve the environment with a perspective based on Maqashid Al-shariah to achieve benefit in this world and the hereafter; (5) A green and blue economy capable of strengthening sustainable development as an effort to support national economic resilience.</i></p> <p>Abstrak: Tata kelola ekonomi dengan menjaga dan melestarikan lingkungan tercermin dalam <i>green economy</i> dan <i>blue economy</i>. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif jenis kepustakaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran ekonomi hijau dan biru dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan peran ekonomi hijau dan biru dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah (1) mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan aspek peternakan, kelembagaan, perikanan dan pariwisata serta wirausaha; (2) mengurangi kemiskinan, emisi karbon dioksida, dan degradasi ekosistem; (3) peningkatan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketimpangan melalui aktivisme yang tidak menyebabkan generasi mendatang menghadapi risiko lingkungan yang signifikan serta kelangkaan ekologis; (4) upaya "konservasi" dan "restorasi" pelestarian lingkungan hidup dengan perspektif yang didasarkan pada Maqashid al-syari'ah guna mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat; (5) Ekonomi hijau dan biru yang mampu menguatkan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya penopang ketahanan ekonomi nasional.</p>
---	--

INTRODUCTION

Masalah global yang semakin kompleks dan serius yang dihadapi manusia di dunia ini adalah masalah lingkungan. Padatnya penduduk akan semakin menimbulkan terbatasnya sumber daya alam, penggunaan teknologi untuk dapat mengeksplotasi alam secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan penurunan kualitas dari lingkungan hidup. Sudah banyak gelojak alam yang terjadi seperti erosi, terkikisnya lapisan ozon, ketidakseimbangan ekologis yang pada gilirannya akan membahayakan kepada kelangsungan hidup.

Kasus pencemaran lingkungan yang bersumber dari perilaku manusia maupun gejala lingkungan baik ruang laut atau udara semakin menerpa bangsa yang ada di seluruh semesta. Mulai dari angin, badai, banjir, tsunami, gempa, gunung meletus. Hal ini menjadi perhatian pentingnya kepedulian lingkungan dan menjaga kelestarian yang ada.

Islam merupakan agama yang komprehensif dan kompleks dalam memperhatikan kebutuhan hidup seluruh makhluk yang hidup di alam semesta, baik tumbuhan, hewan dan khususnya manusia baik secara individual maupun sosial. Permasalahan yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah lingkungan. Karena sumber daya manusia serta makhluk hidup yang ada di alam sangat bergantung dengan kelestarian lingkungan demi dapat menciptakan sumber daya alam yang asri dan memberikan kemanfaatan bukan bahaya atau malapetaka.

Keberlangsungan atas lingkungan nantinya akan berdampak pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekonomi dari suatu bangsa. Dimana *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan total dari seluruh aspek pembangunan dimana manfaatnya harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa ada yang terlewat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan taraf hidup bisa tumbuh secara merata (Hasanuddin & Achmad, 2022).

Konsep maqashid syariah adalah konsep perumusan hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum islam sebagai referensinya. Teori maqashid tidak dapat dipisahkan dengan masalah, karena wujud dari maqasid syariah adalah masalah atau kemaslahatan. Tujuan utama dari maqashid sendiri tercermin dalam pilar pilar kesejahteraan umat manusia sebagaimana dikatakan Asy-Syaitibi yang mencakup lima kemaslahatan yakni: agamanya, jiwanya, akal pikirannya, keturunan, dan harta bendanya (Abdul Wahab, 2022: 26).

Maqashid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Ibnu Ashur adalah tokoh maqashid syariah kontemporer kelahiran

Tunisia. Ia merupakan penerus sekaligus pelengkap konsep maqashid yang digagas oleh para pendahulunya seperti imam al Shatibi, al Ghazali, Izudin Bin Abd. Salam, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim al Jauziyah dan lain-lain (Setyawati, dkk:2023).

Menurut Arifudin peran merupakan pola perilaku yang berkaitan dengan tugas seseorang dalam kedudukannya pada suatu unit sosial (Arifudin, 2023). Peran juga bisa diartikan sebagai perilaku yang memiliki kedudukan tertentu sekaligus mencakup perilaku itu sendiri dan sikap serta nilai yang melekat dalam perilaku (Arifudin et al., 2020).

Definisi peran juga bisa diartikan sebagai pengaturan perilaku dari seseorang pada posisi tertentu (Febrianty et al., 2020). Hal ini memberikan penegasan bahwa peran sangat terkait dengan tindakan atau perilaku seseorang dalam memberikan dampak dengan fungsi yang dimiliki.

Peran dalam konteks ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai tindakan jelas yang telah diterapkan dengan konsep yang ada yang nantinya dapat memberikan dampak signifikan terkait perwujudan pembangunan berkelanjutan dengan program-program yang ada baik dalam ekonomi hijau maupun ekonomi biru.

Esensi ekonomi hijau adalah untuk menggeneralisasi praktik dunia yang positif dan mengidentifikasi pelajaran utama dalam implementasi praktis dari ekonomi hijau. Subyek kajiannya adalah pendekatan teoritis, metodologis dan praktis untuk pengembangan ekonomi hijau dalam rangka mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Milenium, yang juga menjadi dasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, yang diperkenalkan sejak tahun 2015 (Ospanova et al., 2022).

Ekonomi hijau mejadi aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkeanjutan dengan mempertimbangkan besarnya resiko dan masalah bagi generasi mendatang dengan melakukan penggunaan modal yang insentif dan tidak rasional, mengontrol atas penghancuran modal alam. Disini perlu penerapan prinsip ekonomi hijau seperti mengubah tugas lokal menjadi global dalam waktu singkat. Mekanisme dalam penerapan ini dikenal dengan konsep ekonomi hijau (Prudnikova & Mudretsov, 2020).

Regulasi atas keijakan ekonomi hijau secara eksplisit dapat mengurangi masalah dan degradasi lingkungan, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, keadilan dan kemakmuran ekonomi. Dari sini pembangunan berkelanjutan dapat menghasilkan strategi kinerja yang komprehensif, dan peningkatan yang terukur untuk inklusi sosial, kelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi (Khoshnava et al., 2019).

Ekonomi hijau bisa dikatakan sebagai formula pencapaian kemanfaatan dan keuntungan atas usaha ekonomi akan tetapi tetap mempertimbangkan masa depan serta keberlangsungan lingkungan sehingga semua elemen masih bisa berjalan dengan baik.

Konsep Blue Economy dapat dipahami melalui Green Theory yaitu dengan meyakini ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam melestarikan dan melindungi lingkungan laut. Akan terjadi Relevansi di setiap entitas akan saling ketergantungan dengan aspek peran dan fungsi, terlebih output atau outcome yang akan dihasilkan. Pemerintah menjadi pemeran utama dalam pengimplementasikan blue economy di wilayah pesisir(Akbar et al., 2022).

Ekonomi biru sebagai bisnis model yang dapat memberikan keuntungan baik ekonomi atau lingkungan dengan tetap mempertahankan birunya langit dan laut yang mana nantinya dapat dijadikan sebagai solusi holistik serta mendorong ekonomi yang inklusif. Sedangkan menurut Sarundajang mengatakan bahwa ekonomi biru merupakan pembangunan berkelanjutan yang terkemas dengan model ekonomi demi mengembangkan industri kelautan dan perikanan dengan inovasi teknologi sehingga diharapkan dapat menciptakan pekerjaan tanpa merusak lingkungan. Konsep ekonomi berkelanjutan harus memperhatikan lima prinsip dalam implementasinya: (1) ocean maritime security policy, (2)ocean governance policy, (3)ocean maritime cultural policy, (4)ocean environmental policy, and (5)ocean blue economy policy(Maulani et al., 2022).

Disini ekonomi biru dapat dikatakan sebagai bentuk upaya melindungi ekosistem yang ada di laut dan langit dalam pencapaian inklusi bidang ekonomi demi mempertahankan serta menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. SDGs merupakan konsep lanjutan Millenium Development Goals (MDGs) 21 Oktober 2015 yang memiliki arti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana ada 17 tujuan global dengan jumlah target 169 yang disusun dalam rangka menjawab tuntutan dari berbagai pimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, perubahan iklim dan kesenjangan sosial. Berbagai Isu yang muncul yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial diantaranya kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan, perubahan iklim, sanitasi, energi, air, lingkungan dan keadilan sosial(Karyanto & Martiana, 2020).

Bisa dibilang, Arahan UE mengidentifikasi pengungkapan informasi non-keuangan sebagai hal yang penting untuk kemajuan menuju ekonomi global yang berkelanjutan, mendorong perusahaan untuk berkontribusi dalam mencapai 17 SDGs(Patuelli et al., 2022). Korporasi memiliki sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi

yang diperlukan untuk mengejar SDGs, yang membuat mereka bertanggung jawab kepada masyarakat (Fallah Shayan et al., 2022).

Secara rinci tujuan SDGs adalah (Papatungan, 2023):

- 1) Mampu memberikan jaminan hidup sehat serta mendorong kesejahteraan untuk seluruh rakyat di segala usia;
- 2) Menghentikan atau mengakhiri kelaparan, meningkatkan gizi, mencapai ketahanan pangan serta mendorong pertanian berkelanjutan;
- 3) Menghentikan atau mengakhiri segala hal yang berkaitan dengan kemiskinan;
- 4) Mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan serta pembinaan inovatif, pembangunan infrastruktur;
- 5) Memberikan jaminan atas ketersediaan air dan sanitasi berkelanjutan bagi seluruh rakyat;
- 6) Mampu memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif dan terus menerus, memberikan kesempatan kerja penuh, produktif serta pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat.
- 7) Memberikan jaminan atas akses energi yang terjangkau dan modern bagi seluruh rakyat;
- 8) Memberikan jaminan atas pendidikan inklusif dan berkeadilan serta memberikan dorongan belajar seumur hidup bagi seluruh rakyat;
- 9) Mendirikan kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
- 10) Memberikan jaminan kesetaraan atas gender demi pemberdayaan seluruh perempuan;
- 11) Mampu mendorong rakyat yang inklusif dan damai demi membangun keberlanjutan, penyediaan akses keadilan bagi seluruh rakyat, mendirikan institusi yang efektif, inklusif dan akuntabel di seluruh tingkatan;
- 12) Menentukan tindakan untuk memerangi perubahan iklim serta dampak yang ada;
- 13) Mampu mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- 14) Memberikan jaminan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 15) Menggunakan dan melestarikan lautan, samudera dan sumber daya laut secara berkelanjutan;
- 16) Mampu memperkuat perangkat implementasi dan revitalisasi mitra global dalam pembangunan berkelanjutan;

- 17) Memberikan perlindungan, mendorong, dan memperbaharui pemakaian ekosistem darat, pengelolaan hutan berkelanjutan, memerangi penggurunan, memulihkan dan menghentikan degradasi tanah, serta mencegah dan menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

Dalam mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi perlu adanya program khusus yang diberlakukan pemerintah dalam rangka menjaga lingkungan namun tetap menstabilkan kondisi perekonomian. Dan salah satu program pemerintah terkait hal tersebut adalah dengan program ekonomi hijau (*Green Economy*) dan ekonomi biru (*Blue Economy*).

Green Economy dan *Blue Economy* yang mendukung cepatnya perwujudan SDGs Desa yaitu dengan Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir(TOWADI et al., 2022). Temuan *Green Economy* sebagai wujud pergerakan global dalam mendukung SDGs seperti Peran BUMDes dalam Pemanfaatan Sampah menjadi Bahan Bakar(Ismail et al., 2023) dan Pembangunan berkelanjutan diharapkan mengikuti visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, sehingga implementasi kegiatan terwujud. Kebijakan yang prioritas terkait rencana aksi pangan dan gizi atau ketahanan pangan salah satunya dengan memanfaatkan sumberdaya dari laut. Ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya dari laut dikenal dengan konsep *blue economy*. Kebijakan pembangunan laut yang berkelanjutan membutuhkan efektivitas politik untuk kepentingan komunitas dan ekosistem(Adibrata et al., 2022).

Namun dari penelitian terdahulu belum banyak yang memaparkan terkait peran ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sehingga hal itu yang membuat peneliti sekarang tertarik mengangkatnya. Dengan harapan dari literasi yang ada dapat kita ketahui bersama peran penting dengan penerapan ekonomi hijau dan biru dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu apa saja.

METHOD

Penelitian adalah upaya memahami fenomena sastra secara sistematis. Sastra dan fenomenologi itu memiliki hubungan dekat(Endraswara, 2021). Melihat karakter masalah yang diangkat dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif, Dimana penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk numeric, melainkan dalam bentuk kata-kata.

Sesuai dengan karakter dari pendekatan kualitatif, dimana metode yang menekankan analisa pada data secara deskriptif yang berupa kata-kata tertulis yang

diamati, dengan mengamati dan menganalisis kajian peran ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas (Zed, 2008).

Adapun pendekatan yang di gunakan dalam peneltian dan penulisan ini adalah pendekatan konsep pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literature yang tersedia (Hasibuan dkk:2021). Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Konteks berkaitan dengan hal-hak yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis (Rahayu & Arifudin, 2020).

Pemetaan data dan analisis yang ada sekiranya mampu memberikan kemudahan peneliti untuk dapat menemukan informasi yang tepat dalam temuan peran ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RESULT AND DISCUSSION

RESULTS

Bentuk peran ekonomi hijau dan biru dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari penelitian-penelitian dan literasi terdahulu yang memaparkan adanya peran yang ditunjukkan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya penerapan ekonomi hijau dan biru di Indonesia:

- a) Hasanuddin dan Ahmad melakukan penelitian dengan fokus meningkatkan seluruh potensi dalam pencapaian tujuan baik dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan secara komprehensif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang didapatkan bahwa usaha peningkatan seluruh potensi pencapaian SDGs adalah dengan: (1) Penyuluhan Peternakan : penggemukan sapi, masyarakat mengetahui tentang teknis beternak sapi yang baik; (2) Pembuatan Silase: Silase merupakan pakan hijauan ternak yang diawetkan, menambah pengetahuan kepada masyarakat terhadap penyediaan pakan ternak disaat musim kemarau atau kondisi dimana pakan ternak sulit untuk didapatkan. Silase merupakan solusi yang efektif untuk pemanfaatan limbah pertanian. (3) Pelayanan Kesehatan Ternak : pemberian subsidi untuk pelayanan standar di pusat-pusat kesehatan hewan. kegiatan promotif berupa pemberian

- suplemen dan vitamin. penyuntikan vitamin pada sapi dan juga pemberian obat cacing. (4) Penanaman Hijauan Pakan Ternak : penanaman rumput gajah, rumput odot, rumput pakchong dan juga indigofera.(Hasanuddin & Achmad, 2022).
- b) Rohmatan idul juga membuat terobosan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan ekonomi lokal demi mewujudkan tercapainya SDGs di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dengan memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dunia kewirausahaan melalui pelatihan dalam pembuatan kemasan yang menarik serta pemasaran digital(Idul, 2022)
- c) Fenti Prihatini Tui dan Rosman Ilato melakukan usaha dalam pencapaian SDGs dengan Penguatan Potensi Kelembagaan Desa dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan atas pengelolaan keuangan BUMDes. Harapan dalam pendampingan ini adalah agar pemerintah desa Huidu Melito Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara dapat meningkatkan perencanaan kegiatan ekonomi desa, meningkatkan potensi pengembangan kerjasama desa dan pengembangan BUMDes.(Tui & Ilato, 2022).
- d) Jimmy N, Iskandar, Masruri, Wempi Feber, Syaini, Budi Mulyadi dan Irsyad Sudirman menunjukkan kepedulian dalam pencapaian SDGs dengan memberikan Training Of Community Organizer (CO) demi meningkatkan Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Sipil Untuk Melokalkan Dan Mencapai SDGsDesa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Training yang ada diharapkan mampu mengaktifkan kelompok marginal untuk mengidentifikasi, menyusun rencana penyelesaian, serta memperjuangkan ke Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RKPDAPBD). Selain itu harapan untuk dapat memperkuat pemahaman dan penerimaan pemerintah desa untuk mengafirmasi sasaran dan segala indikator SDGs dan usulan yang datang dari komunitas-komunitas yang ada(Nasroen et al., 2022)
- e) Aulia Rahmawati melakukan aksi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mendekati sektor pariwisata Desa demi bisa mendukung SDGs. Adapun tahapan yang dilakukan adalah dengan penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Perlu adanya pemahaman kepada masyarakat atas hak dan kewajiban dalam pembangunan desa dengan memberi pengetahuan sadar wisata. Dalam tahap pengkapasitasan diperoleh peningkatan kemampuan dan ketrampilan, sedangkan tahap pemberian daya diperoleh peningkatan kemampuan intelektual sehingga menginisiasi inovasi.

Selain itu perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan wisata berbasis masyarakat diantaranya: (1) sinergitas pemangku kepentingan pengelola desa wisata dengan pemerintah desa dan masyarakat (2) komitmen pimpinan desa dan masyarakat yang ada. Dari faktor tersebut dirasa sangat diperlukan adanya transformasi digital dalam pemberdayaan masyarakat, perlu adanya penguatan dan pengemasan value creation pada desa prima, dan pengkapasitasan kerjasama pemerintah secara massif dalam mendorong pelaku usaha wisata desa (Rahmawati, 2021)

- f) Mellisa Towadi, Apriyanto A.J. Pauweni dan Julius T. Mandjo Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah. “Desa Mandiri Maritim atau Desa Mandiri Maritim” sebagai bentuk ketahanan maritim dan metode pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Jika ditelaah secara mendalam, program-program yang dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pendidikan maritim khususnya dalam aspek hukum masih dirasa kurang karena banyak program yang dilaksanakan hanya berpusat pada bagaimana sistem administrasi kelembagaannya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pemerintahan ini sangat penting, namun pendidikan maritim dan pangan di desa memiliki peran juga dalam mewujudkan pembangunan nasional. Bagaimana tidak, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa dilandasi wawasan hukum dapat turut menjerumuskan aparat desa ke dalam permasalahan hukum. (TOWADI et al., 2022).
- g) Ismail, Bagus Teguh Santoso, Diana Rahmawati melakukan pergerakan pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar sebagai bentuk penguatan peran BUMDes demi mendukung program pemerintah mewujudkan green economy. Hasil yang ada menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan tahun 2022 atas pengolahan sampah plastik yang dapat menghasilkan bahan bakar alternatif pengganti solar dengan tahapan penelitian alat destilasi meski ada beberapa kekurangan harapannya dapat diperbaiki dan dimodifikasi serta dipergunakan secara massal. Karena sampah plastik merupakan bentuk kegagalan dari manajemen yang tidak ditangani dengan baik (Ismail et al., 2023).
- h) Muhammad Habibi memberikan terobosan dalam penelitiannya dengan fokus menggali dan melihat peran stakeholder pentalix dalam pembangunan kemasyarakatan melalui sinergitas pemerintah, pengusaha, akademisi, komunitas dan

masyarakat serta media masa dalam penguatan kebijakan program P2L (Pekarangan Pangan Lestari) demi mencapai SDGs tanpa kelaparan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menghasilkan konsep kolaborasi pentahelix sebagai pelaksana program P2L yang mana kebijakan dalam mencapai tujuan SDGs tanpa kelaparan yang dikata belum optimal, karena masih terbatasnya stakeholder yang terlibat dalam program pilot project ini. Paling tidak ada lima stakeholder yang harus berperan yakni pemerintah, akademisi, pengusaha, komunitas dan masyarakat serta media massa. Namun sampai detik ini belum ada peran yang ditunjukkan oleh akademisi, pengusaha dan media masa secara mendalam. Dari permasalahan tersebut harapannya kedepan pemerintah dari lini Desa sampai pusat melaksanakan MoU sekaligus MoA yang dilaksanakan secara efektif dan keberlanjutan(Habibi, 2022).

- i) Adji Suradji Muhammad, Tyas, H. S., Puspitasari, C., Jaqueline Faradina, & Sumardjono melakukan upaya dalam mendukung SDGs dengan melakukan sosialisasi urgensi data dan tata kelola pemerintah tanpa kemiskinan di Kelurahan Wonokromo Kabupaten bantul. Hal ini dilakukan dalam rangka ingin mengetahui sejauhmana peran desa melalui pendataan SDGs Desa dapat mengurangi kemiskinan sehingga desa tanpa kemiskinan dapat terwujud. Hasil yang ditunjukkan adalah Kalurahan Wonokromo telah melakukan pendataan SDG's Desa sejak kebijakan tersebut diterapkan, selain itu Kalurahan Wonokromo juga memiliki kapasitas dalam melakukan pendataan melalui sistem yang dimiliki, dan kelembagaan yang ada dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki hingga ke tingkat Rumah Tangga. Pemerintah Kalurahan Wonokromo berkomitmen untuk menggunakan Data SDG's Desa sebagai data dasar dalam menyusun rencana pembangunan agar lebih efektif dan efisien.(Muhammad et al., 2022)
- j) Achmad Zamroni, Nurlaili dan Cornelia Mirwantini Witomo memilih kabupaten Lombok Timur sebagai obyek riset terkait peluang atas penerapan blue economy pada usaha perikanan. Hasil yang diperoleh adalah enam usaha perikanan dapat memberikan efek berganda yang meliputi budidaya lobster, budi daya rumput laut, pengolahan kepiting, pengolahan limbah kepala ikan, dan tambak garam mempunyai peluang menciptakan efek berganda, artinya keenam usaha tersebut dapat menciptakan alternatif mata pencaharian yang bisa berdampak pada peningkatan ekonomi rumah tangga(Zamroni, n.d.). Disini dapat kita lihat penerapan blue economy yang ada mampu mendorong terwujudnya SDGs dengan melakukan peningkatan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan untuk rumah tangga. Dalam

penerapan ini perlu adanya keterlibatan pemerintah desa dan pengusaha agar memberikan ruang untuk pendanaan dan pemasaran produk yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang ada. Apabila pendapatan meningkat maka ekonomi juga akan meningkat dan ketahanan ekonomi nasional akan mudah diwujudkan.

- k) Nota Morra Banu memberikan ulasan terkait konsep blue economy atas pembangunan ekonomi di Indonesia. Disini diformulasikan ada tiga konsep yang harus dilakukan: (1) Kebijakan blue economy adalah terobosan baru yang dinilai lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya laut yang ada di Indonesia, karena Indonesia memiliki kekayaan laut dan potensi hayati dan non hayati yang terkandung di lautan Indonesia. (2) Konsep minapolitan yang dianggap dapat meningkatkan kinerja dari kebijakan blue Economy karena akan terdapat interlinkage yang sangat bagus dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional dan Negara. (3) Konsep minapolitan akan menghasilkan produktifitas perikanan dan kelautan Indonesia menjadi lebih optimum sehingga akan dimungkinkan melakukan ekspor komoditi yang nantinya akan menjadi sumber pundi-pundi devisa negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi di sektor lainnya yang membutuhkan untuk dikembangkan. Sehingga akhirnya sektor kelautan dalam kebijakan blue Economy nantinya akan dapat menjadi pilar atau tumpuan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara (Morra, 2020).
- l) Sudirman Adibrata, Rahmad Lingga, Mohammad Agung Nugraha meneliti tentang Penerapan blue economy dengan budidaya udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). Hasil yang didapatkan adalah pembangunan berkelanjutan harus mengikuti visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, hingga implementasi kegiatan. Kebijakan yang prioritas adalah perencanaan aksi pangan dan gizi atau ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya dari laut. Ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya dari laut dikenal sebagai konsep blue economy. Butuh efektivitas politik untuk kepentingan ekosistem dan komunitas dalam kebijakan pembangunan laut. Penerapan konsep blue economy pada budidaya udang vaname pada kolam terpal bioflok membutuhkan parameter standar mulai DO (oksigen terlarut), NH₃ (amonia), NO₂ (Nitrit), PO₄ (Phospat), TDS, kedalaman, kecerahan, suhu perairan, salinitas dan pH perairan. Kualitas perairan menunjukkan kondisi yang masih bisa ditoleransi karena tidak melampaui daya dukungan dan standar untuk budidaya. Model budidaya udang vaname dengan kolam terpal bioflok mampu meningkatkan kemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan produk yang sehat dan menciptakan inovasi

teknologi ramah lingkungan penggunaan probiotik *Probio_FmUBB*, menyediakan akses usaha skala rumah tangga (*small-scale artisanal fisheries*), dan membuka akses pasar(Adibrata et al., 2022)

- m) Rendi Prayuda dalam risetnya memaparkan strategi yang dilakukan Indonesia dalam penerapan konsep blue economy atas pemberdayaan masyarakat pesisir di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) menghasilkan penemuan bahwa ada dua hal kontradiksi dalam kelestarian lingkungan dunia yaitu teknologi dan industrialisasi. Indonesia negara maritim yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup besar sehingga konsep blue economy dianggap lebih efisien dalam pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dengan merevitalisasi pembangunan berkelanjutan dengan digitalisasi akuakultur untuk mendukung terciptanya kemandirian ketahanan pangan di bidang maritim melalui program pengembangan hilisasi produk perikanan yang memiliki daya saing dan inovasi dalam mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia(Prayuda, 2019)
- n) Harits Dwi Wiratma memiliki pandangan lain dalam mendukung SDGs dengan konsep Green dan Blue Economy dalam sektor Pariwisata yang ada di Pembangunan Pariwisata Kulon Progo. Penemuan yang ada menunjukkan bahwa pembangunan sektor pariwisata sangat masif untuk dilakukan. Sektor penyumbang devisa terbesar setelah kelapa sawit ini harus diperhatikan terlebih pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan daya saing. Peran masif yang ada memiliki kekhawatiran tersendiri dalam pembangunan pariwisata dengan dampak lingkungan yang ada. Sehingga pendekatan konsep blue dan green economy dianggap sebagai solusi terbaik untuk sektor pariwisata demi melestarikan lingkungan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekonomi(Dwi, 2019)
- o) Dhani Akbar, Ryan Anggria Pratama, Yudhyo, Riama Lisnawati Sianturi, Nadya Triyana mengambil penelitian dengan fokus penentuan strategi pengembangan blue economy yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan pendekatan tata kelola ekonomi maritim pesisir kepulauan Riau. Hasil yang ada menunjukkan bahwa perspektif green theory untuk studi ilmu sosial dan ilmu politik dari Silver, dkk seringkali muncul karena disadari bahwa antroposentrisme melihat manusia sebagai makhluk yang egois dan sering mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga teori ini sangat ecological-centric. Sedangkan menurut Sha Melalui Green Theory, konsep Blue Economy harus diterapkan ramah lingkungan dan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan pelestarian dan perlindungan lingkungan laut. Menjadikan

Pemerintah sebagai pemeran utama dalam pengimplementasian blue economy di wilayah pesisir, melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Blue economy harus interkoneksi dan bersifat membangun dan tidak destruktif, Kepulauan Riau meng-cover degradasi lingkungan seluas ribuan hektar hutan mangrove, di antara yang terbesar adalah Bintan dan Batam. Kawasan mangrove ditimbun untuk membangun proyek perumahan (Akbar et al., 2022).

- p) Upaya Islam dalam bentuk penjagaan yaitu *hifzal-nas* dan *hifzal-mal* dengan kegiatan ekonomi dan selalu menjaga lingkungan, sebagai tujuan akhir dalam semua aktivitas manusia yang tertuang dalam *maqashid syari'ah* dengan model ekonomi yang benar-benar hijau yang sesuai dengan karakteristik bangsa jika ingin membangun model implementasi green economy yang dapat dipercaya, dan komprehensif (Prilijayanti, 2023).

Dari berbagai hasil atas penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) dapat diketahui perannya. Adapun secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa peran yang ditunjukkan ekonomi hijau dan biru demi mewujudkan SDGs adalah:

- a) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan aspek peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta wirausaha;

Perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan peternakan dilihat dari program: penyuluhan peternakan, pembuatan silase, pelayanan kesehatan ternak, dan penanaman hijauan pakan ternak (Hasanuddin & Achmad, 2022). Hal ini menunjukkan usaha kuat dalam melestarikan lingkungan dalam bidang peternakan dengan usaha yang ditunjukkan. Tidak hanya mengambil hasil dan manfaat yang ada dari hewan ternak tetapi juga memperhatikan masa depan dari hewan yang ada agar tidak mengalami kepunahan dan tetap ramah lingkungan agar Sumber Daya Alam tidak cepat habis.

Upaya lain yaitu dengan memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dunia kewirausahaan melalui pelatihan dalam pembuatan kemasan yang menarik serta pemasaran digital (Idul, 2022). Perlu sekiranya memberikan peningkatan soft skill dalam menciptakan inovasi dalam berwirausaha. Karena dengan memiliki jiwa kewirausahaan masyarakat dapat melakukan aktivitas bisnis dan kegiatan memberdayakan ekonomi kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendapatan bagi individu, keluarga dan negara.

Dalam upaya mewujudkan SDGs perlu sekali adanya penguatan potensi kelembagaan khususnya di Desa. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi dan pendampingan atas pengelolaan keuangan BUMDes (Tui & Ilato, 2022) dan memberikan Training Of Community Organizer (CO) demi meningkatkan Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Sipil Untuk Melokalkan Dan Mencapai SDGs Desa (Nasroen et al., 2022) dan sosialisasi urgensi data dan tata kelola pemerintah tanpa kemiskinan (Muhammad et al., 2022). Upaya ini nantinya dapat membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Aspek pariwisata juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan lingkungan yang ada. Pembangunan sektor pariwisata sangat masif karena sektor pariwisata penyumbang devisa terbesar setelah kelapa sawit ini harus diperhatikan terlebih pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan daya saing (Dwi, 2019) (1) sinergitas pemangku kepentingan pengelola desa wisata dengan pemerintah desa dan masyarakat (2) komitmen pimpinan desa dan masyarakat yang ada (Rahmawati, 2021)

b) Mengurangi kemiskinan, emisi karbon dioksida, dan degradasi ekosistem;

Dalam rangka menjaga lingkungan perlu adanya pengolahan sampah plastik yang dapat menghasilkan bahan bakar alternatif pengganti solar, Karena sampah plastik merupakan masalah global yang harus diselesaikan (Ismail et al., 2023). Hal ini dilakukan demi menjaga terjadinya degradasi ekosistem yang ada. Karena ekosistem menjadi vital dan urgen untuk masa depan pemberdayaan ekonomi sehingga harapan kedepan mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada.

Upaya lain dalam menjaga emisi dan degradasi ekosistem dapat terlihat dari penerapan konsep blue economy pada budidaya udang vaname pada kolam terpal bioflok membutuhkan parameter standar mulai DO (oksigen terlarut), NH₃ (amonia), NO₂ (Nitrit), PO₄ (Phospat), TDS, kedalaman, kecerahan, suhu perairan, salinitas dan pH perairan. Kualitas perairan menunjukkan kondisi yang masih bisa ditoleransi karena tidak melampaui daya dukung dan standar untuk budidaya. Model budidaya udang vaname dengan kolam terpal bioflok mampu meningkatkan kemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan produk yang sehat dan menciptakan inovasi teknologi ramah lingkungan penggunaan probiotik *Probio_FmUBB*, menyediakan akses usaha skala rumah tangga (*small-scale artisanal fisheries*), dan membuka akses pasar (Adibrata et al., 2022).

- c) Peningkatan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketimpangan melalui aktivisme yang tidak menyebabkan generasi mendatang menghadapi risiko lingkungan yang signifikan serta kelangkaan ekologis.

Peningkatan kesejahteraan manusia memang tidak mudah untuk bisa dipecahkan. Naam ada usaha yang bisa dilakukan melalui aktivitas yang sekiranya tidak menyebabkan generasi mendatang agar lebih siap dalam menghadapi resiko lingkungan akibat kelangkaan ekologis. Salah satu usaha yang bisa dilakukan yaitu dengan menerapkan konsep *blue economy* harus diterapkan ramah lingkungan dan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan pelestarian dan perlindungan lingkungan laut. Menjadikan Pemerintah sebagai pemeran utama dalam pengimplementasian *blue economy* di wilayah pesisir, melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. *Blue economy* harus interkoneksi dan bersifat membangun dan tidak destruktif, Kepulauan Riau meng-cover degradasi lingkungan seluas ribuan hektar hutan mangrove, di antara yang terbesar adalah Bintan dan Batam. Kawasan mangrove ditimbun untuk membangun proyek perumahan(Akbar et al., 2022).

Terdapat peran yang jelas atas konsep ekonomi biru dalam mewujudkan kesejahteraan bagi manusia dalam mempercepat SDGs di Indonesia. Selain masif dalam pemberdayaan lingkungan juga antipati bagi generasi penerus dalam bersikap atas dampak lingkungan yang semakin hari semakin memburuk akibat pemanas global.

- d) Upaya "konservasi" dan "restorasi" pelestarian lingkungan hidup dengan perspektif yang didasarkan pada Maqashid al-syari'ah guna mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat;

Islam sebagai agama universal sangat berupaya dalam bentuk penjagaan yaitu *hifzal-nas* dan *hifzal-mal* dengan kegiatan ekonomi dan selalu menjaga lingkungan, sebagai tujuan akhir dalam semua aktivitas manusia yang tertuang dalam maqashid syari'ah dengan model ekonomi yang benar-benar hijau yang sesuai dengan karakteristik bangsa jika ingin membangun model implementasi green economy yang dapat dipercaya, dan komprehensif(Prilijayanti, 2023).

Konteks bahwa umat muslim sebagai aktor dalam menjaga dan melestarikan alam semesta sudah ada sejak zaman nabi adam diciptakan. Hal ini memberikan tendensi bahwa pelaku yang bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup sumber daya alam ada pada tangan manusia. Hal ini karena manusia harus mampu menjaga diri dan lingkungan untuk nantinya dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di

akhirat. Apabila hal ini dapat dilakukan maka keseimbangan tujuan manusia dalam mempertanggungjawabkan amal ibadah baik di dunia maupun diakhirat dapat terkonversi dan restorasi lingkungan dan manusia.

- e) Ekonomi hijau dan biru yang mampu menguatkan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya penopang ketahanan ekonomi nasional.

Penguatan Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya dalam menopang ketahanan ekonomi nasional seringkali menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Namun hal itu tidaklah mustahil dengan upaya dan tekad pemerintah dalam menerapkan konsep blue economy bagi masyarakat demi menjamin masa depan ekosistem laut yang ada.

Konsep blue economy atas pembangunan ekonomi di Indonesia ada formulasi konsep: (1) Kebijakan blue economy adalah terobosan baru yang dinilai lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya laut yang ada di Indonesia (2) Konsep minapolitan yang dianggap dapat meningkatkan kinerja dari kebijakan blue Economy (3) Konsep minapolitan akan menghasilkan produktifitas perikanan dan kelautan Indonesia menjadi lebih optimum sehingga akan dimungkinkan melakukan ekspor komoditi yang nantinya akan menjadi sumber pundi-pundi devisa negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi di sektor lainnya yang membutuhkan untuk dikembangkan. Sehingga akhirnya sektor kelautan dalam kebijakan blue Economy nantinya akan dapat menjadi pilar atau tumpuan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara (Morra, 2020).

Harits Dwi Wiratma memiliki pandangan lain dalam mendukung SDGs dengan konsep Green dan Blue Economy dalam sektor Pariwisata yang ada di Pembangunan Pariwisata Kulon Progo. Penemuan yang ada menunjukkan bahwa pembangunan sektor pariwisata sangat masif untuk dilakukan. Sektor penyumbang devisa terbesar setelah kelapa sawit ini harus diperhatikan terlebih pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan daya saing. Peran masif yang ada memiliki kekhawatiran tersendiri dalam pembangunan pariwisata dengan dampak lingkungan yang ada. Sehingga pendekatan konsep blue dan green economy dianggap sebagai solusi terbaik untuk sektor pariwisata demi melestarikan lingkungan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekonomi (Dwi, 2019).

Disini dapat dilihat peran penting atas ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

CONCLUSION

Dari hasil temuan yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa peran ekonomi hijau dan biru dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (1) mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan aspek peternakan, kelembagaan, perikanan dan pariwisata serta wirausaha; (2) mengurangi kemiskinan, emisi karbon dioksida, dan degradasi ekosistem; (3) peningkatan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketimpangan melalui aktivisme yang tidak menyebabkan generasi mendatang menghadapi risiko lingkungan yang signifikan serta kelangkaan ekologis; (4) upaya "konservasi" dan "restorasi" pelestarian lingkungan hidup dengan perspektif yang didasarkan pada Maqashid al-syari'ah guna mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat; (5) Ekonomi hijau dan biru yang mampu menguatkan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya penopang ketahanan ekonomi nasional.

Penelitian ini terbatas pada temuan yang ditemukan dan dianalisis dari tahun 2019 sampai 2023 terkait penerapan yang nantinya menunjukkan peran ekonomi hijau dan biru dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ada di Indonesia.

Implikasi penelitian ini adalah kedepannya akan ada penelitian yang memaparkan secara kompleks atas permasalahan yang sama dengan tujuan memberikan referensi bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus mengembangkan program yang ada agar leboh cepat mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ada di Indonesia dengan integrasi, kolaborasi dan keseimbangan dari segala aspek dan elemen-elemen Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada. Novelty penelitian ini adalah belum ada penelitian terdahulu yang sekaligus memaparkan peran atas penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

REFERENCES

- Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. *Al-Urban*, 1(1), 52-67.
- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Adibrata, S., Lingga, R., & Nugraha, M. A. (2022). PENERAPAN BLUE ECONOMY DENGAN BUDIDAYA UDANG VANAME (*LITOPENAEUS VANNAMEI*).

- Journal of Tropical Marine Science, 5(1), 45–54.
<https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v5i1.2964>
- Akbar, D., Pratama, R. A., Yudhyo, Sianturi, R. L., & Triyana, N. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN BLUE ECONOMY WILAYAH PERBATASAN INDONESIA: TATA KELOLA EKONOMI MARITIM PESISIR KEPULAUAN RIAU. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 166–177.
- Arifudin, O. (2023). PENDAMPINGAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM SUBMIT JURNAL ILMIAH PADA OPEN JOURNAL SYSTEM. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O., Hidana, R., Julius, A., Doho, D. B., Sormin, E., Ghazali, A., Marlina, H., Lasmono, S., Nurmiyanti, L., & Fatmasari, R. (2020). PSIKOLOGI PENDIDIKAN (TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIS).
- Dwi, H. (2019). PEMBANGUNAN PARIWISATA KULON PROGO MELALUI KONSEP GREEN ECONOMY DAN BLUE ECONOMY. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(2), 161–172.
- Endraswara, S. (2021). METODOLOGI PENELITIAN FENOMENOLOGI SASTRA.
- Fallah Shayan, N., Mohabbati-Kalejahi, N., Alavi, S., & Zahed, M. A. (2022). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) AS A FRAMEWORK FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). *Sustainability*, 14(3), 1222.
- Febrianty, F., Arifudin, O., Naibaho, L., Palindih, L. I., Nurmiyanti, L., Doho, Y. D. B., Choiriyati, W., Syamsuriansyah, S., Nadeak, B., & Mulyadi, D. (2020). KEPEMIMPINAN & PRILAKU ORGANISASI (KONSEP DAN PERKEMBANGAN).
- Habibi, M. (2022). SINERGITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEKARANGAN PANGAN LESTARI MENCAPAI SDGS TANPA KELAPARAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. 5(1), 197–206.
- Hasanuddin, H., & Achmad, S. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN SDGS DESA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TARAF HIDUP TUMBUH MERATA. *Jambura Journal of Husbandry and Agriculture Community Serve (JJHCS)*, 1(2).

- Hasibuan, S. W., Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B. M., Dewindaru, D., Shalihah, B. M., ... & Pratiwi, H. (2021). METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM. Media Sains Indonesia.
- Idul, R. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN EKONOMI LOKAL UNTUK MEWUJUDKAN PENCAPAIAN SDGs DI DESA BILUHU BARAT KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(5).
- Ismail, I., Santoso, B. T., & Rahmawati, D. (2023). PENGUATAN PERAN BUMDES DALAM PEMANFAATAN SAMPAH MENJADI BAHAN BAKAR DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PEMERINTAH MEWUJUDKAN GREEN ECONOMY. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(4).
- Karyanto, B., & Martiana, R. (2020). PERAN AKUNTAN DAN PERUSAHAAN MENUJU TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS / SDGs) 2030. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 15–30. <https://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/JSAB/article/view/383>
- Khoshnava, S. M., Rostami, R., Zin, R. M., Štreimikienė, D., Yousefpour, A., Strielkowski, W., & Mardani, A. (2019). ALIGNING THE CRITERIA OF GREEN ECONOMY (GE) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) TO IMPLEMENT SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *SUSTAINABILITY*, 11(17), 4615. <https://doi.org/10.3390/su11174615>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1130>

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (IJARAH). *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1129>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Maulani, S. F., Tsani, R. R., Tinambunan, R. C. H., & Mauluddin, F. M. (2022). TRENDS OF BLUE ECONOMIC STUDY RESEARCH: ONE-DECADE SYSTEMATIC REVIEW. 11(3), 1285–1294. <https://stiemituqaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/1057>
- Morra, N., BG. (2020). KONSEP BLUE ECONOMY TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 22(1), 27–31.
- Muhammad, A. S., Tyas, H. S., Puspitasari, C., & Faradina, J. (2022). URGENSI DATA SDGS DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN TANPA KEMISKINAN DI KALURAHAN WONOKROMO KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 3(2), 223–240.
- Nasroen, J., Iskandar, I., Masruri, M., Feber, W., Syaini, S., Mulyadi, B., & Sudirman, I. (2022). TRAINING OF COMMUNITY ORGANIZER (CO) PENINGKATAN KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK MELOKALKAN DAN MENCAPAI SDGS DESA GUNUNG SARI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 241–255.
- Ospanova, A., Popovychenko, I. P., & Chuprina, E. (2022). GREEN ECONOMY–VECTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *Problemy Ekorozwoju*, 17(1).

- Paputungan, F. (2023). GET TO KNOW THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs). *Journal of Hulonthalo Service Society*, 2(2), 1–6. <https://journals.ubmg.ac.id/index.php/JHSS/article/view/1144>
- Patuelli, A., Carungu, J., & Lattanzi, N. (2022). DRIVERS AND NUANCES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: TRANSCENDING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN FAMILY FIRMS. *Journal of Cleaner Production*, 373, 133723.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Prayuda, R. (2019). STRATEGI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP BLUE ECONOMY TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46-64.
- Prijayanti, D. (2023). GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH DAN MAQASHID SYARIAH (HIFZAL-NASL&HIFZ AL-MAL). *Qusqazah*, 7(1), 15–26.
- Prudnikova, A., & Mudretsov, A. (2020). GREEN ECONOMY AS A DRIVER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *Ekonomika i Matematicheskie Metody*, 56(2), 32–39.
- Rahayu, Y. N., & Arifudin, O. (2020). PROGRAM LINIER (TEORI DAN APLIKASI).
- Rahmawati, A. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM MENDUKUNG SDG'S DESA. *Journal of Public Power*, 5(2), 151–158.
- Setiyawati, P. S., Nuroini, D. A., Lestari, D., Farida, E. A., Khoiruddin, M., & Latifah, E. (2023). PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASHUR DALAM AKUNTANSI MURABAHAH DALAM METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN. *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 2(01 Maret), 426-435.

- TOWADI, M., PAUWENI, A. A., & MANDJO, J. T. (2022). DESA MANDIRI MARITIM: WUJUD KETAHANAN MARITIM MELALUI PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT PESISIR DI DESA PONIPINGAN, SULAWESI TENGAH. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 99–107.
- Tui, F. P., & Ilato, R. (2022). PENGUATAN POTENSI KELEMBAGAAN DESA MENUJU PERCEPATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(2), 331–347.
- Zamroni, A. (n.d.). PELUANG PENERAPAN KONSEP BLUE ECONOMY PADA USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR. 4(2).
- Zed, M. (2008). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.